

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Ketepatan Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap di Provinsi DKI Jakarta

Implementasi Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap di Provinsi DKI Jakarta, disimpulkan sebagai berikut:

1. Tepat Kebijakan

Kebijakan Ganjil Genap di DKI Jakarta, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 merupakan respons terhadap masalah kemacetan dan polusi udara yang semakin kompleks. Kebijakan ini relevan dengan situasi lalu lintas Jakarta dan sudah terdefinisi dengan jelas. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan transportasi umum ramah lingkungan serta mengembangkan infrastruktur pendukung seperti jalur sepeda dan fasilitas pejalan kaki, menjadikannya kebijakan yang tepat.

2. Tepat Pelaksana

Implementasi Kebijakan Ganjil Genap di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Ditlantas Polda Metro Jaya, dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Para pelaksana kebijakan telah menjalankan tugasnya dengan baik, didukung oleh koordinasi yang terjalin antara Dishub DKI Jakarta, Ditlantas Polda Metro Jaya, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Koordinasi ini mencakup pengawasan terhadap seluruh pihak yang terlibat dan

pemantauan kualitas udara oleh DLH untuk menilai dampak kebijakan terhadap lingkungan. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan tepat pelaksana.

3. Tepat Proses

Implementasi kebijakan ganjil genap di DKI Jakarta telah mengikuti tahapan terstruktur, termasuk perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Meskipun prosedur berjalan baik, menurunnya kepatuhan masyarakat menghambat efektivitas kebijakan dalam jangka panjang, sehingga hasilnya belum sepenuhnya optimal.

4. Tepat Lingkungan

Kebijakan ganjil-genap di DKI Jakarta masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip tepat lingkungan karena meskipun mendapat dukungan politik yang kuat dan didukung dengan infrastruktur transportasi yang semakin berkembang, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan masih rendah. Faktor sosial, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya kebijakan ini serta keterbatasan alternatif transportasi bagi sebagian warga, menjadi tantangan utama dalam implementasi yang efektif.

5. Tepat Target

Kebijakan ganjil genap di DKI Jakarta belum sepenuhnya tepat target karena meskipun menyasar pengguna kendaraan pribadi roda empat sebagai kontributor utama kemacetan dan polusi, kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan yang mengurangi efektivitasnya. Alih-

alih mengurangi volume kendaraan secara signifikan, kebijakan ini justru mendorong masyarakat mencari alternatif seperti membeli mobil dengan pelat nomor berbeda atau bahkan menggunakan pelat palsu, yang pada akhirnya melemahkan tujuan awal kebijakan.

4.1.2 Faktor Penentu Ketidaktepatan Implementasi Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap di Provinsi DKI Jakarta

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis faktor ketidaktepatan kebijakan ganjil genap di DKI Jakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa empat aspek yaitu standar dan sasaran kebijakan, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana, serta komunikasi antarorganisasitelah berjalan optimal. Namun, dua aspek yaitu sumber daya serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik masih belum optimal, sehingga menghambat efektivitas kebijakan secara keseluruhan.

Pertama, Sasaran kebijakan, yang berfokus pada pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dan peningkatan penggunaan transportasi umum, sudah didefinisikan dengan baik.

Kedua, Dishub dan Ditlantas memiliki sumber daya yang memadai, namun DLH menghadapi kendala anggaran dalam pemantauan kualitas udara. Keterbatasan stasiun pemantau udara menghambat evaluasi efektivitas kebijakan.

Ketiga, Karakteristik organisasi dan pelaksana kebijakan ganjil-genap di DKI Jakarta menunjukkan kesiapan yang baik, terutama pada Dishub, Ditlantas, dan DLH. Ketiga instansi ini memiliki struktur yang

terorganisir, tenaga ahli yang berkompeten, serta dukungan teknologi yang memadai sebagai keunggulan dalam pelaksanaan kebijakan.

Keempat, Sikap para pelaksana kebijakan ganjil genap di DKI Jakarta sangat mendukung keberhasilan implementasi. Komitmen tinggi dari Dishub, Ditlantas, dan DLH terlihat dari upaya mereka dalam perencanaan, pengawasan, dan penegakan aturan. Ketersediaan mereka untuk menghadapi tantangan serta kompetensi yang dimiliki, termasuk tenaga ahli dan teknologi yang tepat, memastikan kebijakan berjalan efektif.

Kelima, Komunikasi antarorganisasi terkait dan koordinasi kegiatan antara Dishub, Ditlantas, dan DLH berjalan dengan baik. Mereka bekerja dengan penuh dedikasi dan profesionalisme, memastikan setiap tahap implementasi kebijakan terkoordinasi dengan optimal. Selain itu, monitoring dan evaluasi dilakukan secara efektif untuk menjamin kebijakan ganjil genap dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Keenam, Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, Dari segi ekonomi, kebijakan ganjil genap berdampak pada penurunan pendapatan pelaku usaha dan logistik akibat akses yang terbatas, terutama bagi sektor yang bergantung pada mobilitas tinggi. Secara sosial, masih terdapat tantangan dalam kepatuhan masyarakat, di mana beberapa pengendara mencari cara untuk menghindari aturan, sehingga mengurangi efektivitas kebijakan. Sementara itu, dari sisi politik, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian mendukung karena dapat mengurangi

kemacetan dan polusi udara, namun sebagian lainnya merasa dirugikan karena keterbatasan mobilitas dan dampaknya terhadap ekonomi.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan di lapangan masih terdapat kendala dalam penelitian ini, berikut merupakan beberapa rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan:

1. Kebijakan dinyatakan belum tepat kebijakan dan tepat lingkungan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan. Oleh karena itu, pemerintah terutama Dinas Perhubungan dan Ditlantas Polda Metrojaya perlu memperluas penerapan tilang elektronik (ETLE) untuk meningkatkan pengawasan dan kepatuhan masyarakat.
2. Dari aspek tepat target, kebijakan ganjil genap belum tepat target dikarenakan muncul praktik ilegal seperti penggunaan pelat nomor palsu semakin memperumit permasalahan. Untuk mengatasi hal ini, pihak Ditlantas Polda Metrojaya dan Dinas Perhubungan perlu memperketat pengawasan melalui operasi razia kendaraan secara berkala guna menindak tegas pelanggaran tersebut serta menerapkan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar.
3. Kebijakan ganjil genap justru mendorong masyarakat untuk membeli mobil bekas sebagai solusi agar tetap dapat beraktivitas tanpa terhalang aturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas serta aksesibilitas

transportasi umum harus menjadi prioritas utama pemerintah. Dengan adanya transportasi umum yang nyaman, terjangkau, dan efisien, masyarakat akan memiliki alternatif yang lebih baik dibandingkan harus membeli kendaraan tambahan, sehingga tujuan utama kebijakan ini dalam mengurangi kemacetan dapat tercapai tanpa menimbulkan dampak negatif lainnya.

4. Dari sisi sumber daya, pemantauan kualitas udara masih terkendala keterbatasan anggaran dan jumlah stasiun pemantauan. Hal ini dapat diatasi dengan penambahan anggaran untuk stasiun pemantau udara
5. Dari sisi lingkungan ekonomi, pendapatan pelaku usaha dan logistik menurun akibat akses terbatas Untuk mengurangi dampak negatif ini, pemerintah dapat memberikan insentif atau subsidi bagi usaha kecil dan sektor logistik yang terdampak. Selain itu, fleksibilitas jam operasional bagi kendaraan niaga perlu diterapkan agar aktivitas bisnis tetap berjalan tanpa terganggu kebijakan pembatasan kendaraan.
6. Dari aspek lingkungan sosial dan politik, kebijakan ini masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat terkait aksesibilitas, efisiensi transportasi umum, dan dampak ekonomi. Untuk meningkatkan dukungan publik, pemerintah perlu memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui forum diskusi atau survei kepuasan. Sosialisasi yang lebih interaktif berbasis komunitas juga diperlukan agar masyarakat lebih memahami manfaat kebijakan ini